

---

**ANALISIS KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN DI PROVINSI RIAU***Analysis of Agricultural Extension Institutions in the Province of Riau***El Syabrina <sup>1</sup>, Dedi Budiman Hakim <sup>2</sup>, dan Fredian Tonny <sup>3</sup>**<sup>1</sup> Staff Sekretariat Pemerintah Kota Pekanbaru. E-mail: mpdipb@hotmail.com<sup>2</sup> Staff Pengajar Departemen Ilmu Ekonomi. Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB  
E-mail: dedihakim@gmail.com,<sup>3</sup> Staff Pengajar Departemen Sains Komunikasi Pengembangan Masyarakat. Fakultas Ekologi Manusia IPB  
E-mail: frediantonny@yahoo.com

---

**ABSTRACT**

*Varied institutions responsible for agricultural extension in Riau Province have certainly run independently and caused the agricultural extension unproductive, ineffective, and inefficient. This study aims: 1) To identify the structure of agricultural extension institutions in the regional autonomy era in the Riau Province; 2) To analyze the implementation of agricultural extensions in different institutions, 3) To analyze the effect of different extension implementation on the performance of extension workers and the degree of technological application among farmers. This research was conducted from March-April 2008 in Pekanbaru, Kampar Regency and Pelalawan Regency. Methods used in this study were internal and external factors analysis, SWOT analysis (Strengths-Weakness-Opportunities-Threats), and QSPM analysis (Quantitative Strategic Planning Matrix). Result showed that: 1) Implementation of Laws Number 22/1999 and Number 32/2004 along with the regulations under the laws had caused the agricultural extensions in the Province of Riau to experience coevolution in the social infrastructure of agricultural extensions; 2) The functions of services and arrangement still dominate the working system of extension; 3) The frequency of LAKU is not fully implemented yet, and 4) Formulated strategy in developing the agricultural extension institutions in the Province of Riau is to form a separate and specific institution that regulates agricultural extension.*

*Keywords: Agriculture, Extension, Institution, Riau Province, Strategies*

**ABSTRAK**

Penyuluhan di Provinsi Riau diselenggarakan dengan kelembagaan yang beragam dimana masing-masing instansi berjalan sendiri-sendiri sehingga penyelenggaraan penyuluhan pertanian menjadi tidak produktif, tidak efektif dan tidak efisien. Kajian ini bertujuan untuk: 1) Mengidentifikasi keragaman kelembagaan penyuluhan pertanian di era otonomi daerah di Provinsi Riau; 2) Menganalisis pelaksanaan sistem kerja penyuluhan pertanian pada kelembagaan yang berbeda; 3) Menganalisis dampak penyelenggaraan penyuluhan yang berbeda terhadap kinerja penyuluh dan tingkat penerapan teknologi petani. Kajian dilaksanakan pada Maret-April 2008 di Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan. Metode yang digunakan yaitu analisis faktor internal dan eksternal, analisis SWOT (*Strengths-Weakness-Opportunities-Threats*), dan analisis QSPM (*Quantitative Strategic Planning Matrix*). Hasil kajian mengungkap: 1) Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 beserta perangkat peraturan perundangan di bawahnya menyebabkan kelembagaan penyuluhan pertanian di Provinsi Riau mengalami perubahan bersama (*coevolution*) pranata sosial kelembagaan penyuluhan; 2) Pelaksanaan fungsi pelayanan dan fungsi pengaturan masih mendominasi sistem kerja penyuluhan; 3) Frekuensi LAKU belum sepenuhnya terlaksana; dan 4) Rumusan strategi dalam pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian di Provinsi Riau adalah dengan membentuk badan sendiri yang spesifik menaungi penyuluhan pertanian.

Kata kunci: Pertanian, Penyuluhan, Kelembagaan, Provinsi Riau, Strategi

---

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Pembangunan pertanian telah memberikan sumbangan besar dalam pembangunan nasional, baik berupa sumbangan langsung seperti peningkatan ketahanan pangan nasional, peningkatan pendapatan masyarakat, maupun sumbangan tidak langsung melalui penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan. Dalam rangka membangun kemandirian pangan, pemerintah berusaha agar pemenuhan kebutuhan pangan diutamakan dari produksi dalam negeri dan meminimalisasi impor sehingga strategi yang ditempuh adalah dengan memprioritaskan pembangunan ekonomi berbasis pertanian dan perdesaan untuk meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat.

Mengacu pada perkembangan lingkungan strategis di sektor pertanian, perikanan dan kehutanan, usaha pertanian pada umumnya didominasi oleh usaha skala kecil, tingkat pendidikan petani/nelayan masih rendah dan bermodal kecil, serta belum mampu menerapkan teknologi atau inovasi. Akibatnya adalah hanya sebagian kecil potensi sumberdaya itu yang dapat dimanfaatkan dan karena ketidaktepatan dalam penerapan inovasi teknologi terjadi penurunan kuantitas maupun kualitas produk yang dihasilkan (Suryana, 2003).

Hingga saat ini sektor pertanian di Provinsi Riau masih merupakan sektor yang memberikan lapangan usaha dominan dan menyerap tenaga kerja paling besar (52,24%) sehingga arah kebijakan pembangunan tahun 2004-2008 bidang pertanian adalah pengembangan sektor pertanian, khususnya tanaman pangan terpadu dengan peternakan (Pemerintah Provinsi Riau, 2008). Namun produktivitas hasil pertanian di Provinsi Riau tahun 2001-2007 menunjukkan perkembangan yang kurang mengembirakan. Banyak faktor yang menjadi kendala peningkatan produktivitas dan produksi pangan di Provinsi Riau, diantaranya yang terpenting

adalah kurangnya bimbingan kepada petani karena tidak difungsikannya institusi penyuluhan pertanian secara optimal seperti masa lalu.

Penyuluhan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan pertanian, karena mempunyai tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan pendidikan non formal bagi petani/nelayan. Kebijakan publik yang berkaitan dengan kelembagaan penyuluhan yang dibuat oleh kabupaten/kota jelas sangat berdampak terhadap pencapaian tujuan akhir dari pembangunan pertanian yaitu mensejahterakan petani. Untuk itu, perlu ditinjau kembali kebijakan publik yang telah dibuat oleh kabupaten/kota di Provinsi Riau yang berkaitan dengan pembentukan kelembagaan penyuluhan

### Perumusan Masalah

Kinerja penyuluhan pertanian semakin menunjukkan penurunan karena penyelenggaraannya ditempatkan pada posisi minor. Bahkan memasuki abad ke 21 kinerja penyuluhan pertanian dapat dikatakan mencapai titik terendah (Mardikanto, 2008).

Di era tahun 1980-an (BIMAS), penyuluhan pertanian dilakukan melalui pendekatan sentralistik dan koordinasi yang ketat antar instansi terkait. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian dilakukan secara integral dan didukung dengan baik oleh empat catur sarana (PPL, Kios Saprotan, BRI dan KUD) serta kepemimpinan petani yang progresif. Pola penyampaian teknologi dilakukan dengan pendekatan dipaksa, terpaksa dan menjadi biasa. Sedangkan pada era otonomi daerah, paradigma pembangunan bergeser dari pendekatan sentralistik menjadi desentralistik, dari pendekatan dipaksa menjadi pendekatan partisipatif, serta dipengaruhi oleh berbagai kepentingan. Bahkan di beberapa daerah, penyuluhan pertanian dianggap suatu kegiatan yang dianggap kurang penting sehingga banyak kelembagaan penyuluhan pertanian yang terlikuidasi (Amanah, 2006).

Penyuluhan di Provinsi Riau diselenggarakan dengan kelembagaan yang bervariasi, baik oleh Kantor Pusat Informasi Penyuluhan Terpadu, Kantor Informasi dan Penyuluhan Pembangunan, serta Dinas Pertanian. Kondisi kelembagaan yang sangat beragam ini mempengaruhi kinerja penyelenggaraan penyuluhan dan konsekuensinya berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan petani karena dalam kenyataannya masing-masing instansi berjalan sendiri-sendiri, sehingga penyelenggaraan penyuluhan pertanian menjadi tidak produktif, tidak efektif dan efisien. Untuk itu perlu dilakukan kajian mengenai keragaan, pelaksanaan, dampak penyelenggaraan serta rancangan strategi terkait kelembagaan penyuluhan pertanian di era otonomi daerah di Provinsi Riau.

### Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan dari kajian ini adalah:

1. Mengidentifikasi keragaan kelembagaan penyuluhan pertanian di era otonomi daerah di Provinsi Riau.
2. Menganalisis pelaksanaan sistem kerja penyuluhan pertanian pada kelembagaan yang berbeda.
3. Menganalisis dampak penyelenggaraan penyuluhan yang berbeda terhadap kinerja penyuluh dan tingkat penerapan teknologi petani.
4. Merumuskan strategi dan program pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian yang terbaik untuk Provinsi Riau

### TINJAUAN PUSTAKA

#### Pengertian dan Peranan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian

Kelembagaan adalah suatu kompleks yang terdiri dari peraturan dan peranan sosial. Dengan kata lain, kelembagaan memiliki aspek kultural berupa norma-norma dan nilai-nilai serta aspek struktural berupa berbagai peranan sosial (Tonny *et al.*, 2004).

Penyuluhan pertanian sebagai bagian dari sistem pembangunan pertanian mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan pertanian. Penyuluhan pertanian adalah upaya membangun kemampuan masyarakat secara persuasif-edukatif yang terutama dilakukan melalui proses pembelajaran petani dengan menerapkan prinsip-prinsip penyuluhan pertanian secara baik dan benar didukung oleh kegiatan pembangunan pertanian lainnya (Departemen Pertanian, 2002). Kegiatan penyuluhan pertanian adalah kegiatan terencana dan berkelanjutan yang harus diorganisasikan dengan baik (Departemen Pertanian, 2006).

Inti kelembagaan penyuluhan adalah petani dan penyuluh yang melakukan komunikasi dua arah, baik antara penyuluh dengan petani, antara petani yang satu dengan yang lain, antara petani dengan keluarganya serta antara penyuluh dengan penyuluh (Suhardiyono, 1990). Efektivitas penyuluhan pertanian akan sangat ditentukan oleh seberapa jauh lembaga penyuluhan diperhatikan oleh sub sistem yang lain, atau mampu mengembangkan dirinya menjadi suatu kegiatan strategis (Mardikanto, 1991).

#### Perkembangan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian

Perubahan sistem pemerintahan dari paradigma yang berorientasi pada sentralisasi ke desentralisasi, telah memberikan konsekuensi sangat luas dan mendalam pada sistem tata pemerintahan daerah di Indonesia. Perubahan tersebut dapat dilihat dari bergesernya status dan kedudukan suatu kelembagaan dalam keseluruhan formasi tata pemerintahan daerah. Konsekuensi dari perubahan tersebut adalah pada batasan kekuasaan dan wewenang suatu kelembagaan dalam mengimplementasikan proses-proses regulasi, legislasi dan kebijakan publik.

Sejak berorientasi pada paradigma desentralisasi, formasi sosial dalam sistem tata pemerintahan di daerah telah membentuk pola-pola relasi kekuasaan dan

wewenang yang berbasis tidak hanya pada pilar *regulative*, tetapi juga telah mempertimbangkan pilar *normative* dan *cultural-cognitive* yang berbasis otonomi lokal (Nasdian, 2008).

Pembentukan kelembagaan dalam masyarakat tidak terlepas dari peranan individu, kelompok atau pemerintah sehingga lembaga-lembaga yang hidup dalam masyarakat yang ada bersifat informal dan ada pula yang tercipta secara formal baik dari masyarakat maupun luar masyarakat. Pergeseran paradigma penyuluhan dari teknik budidaya (*on-farm*) menuju sistem usaha agribisnis telah mengubah sistem kelembagaan penyuluhan, dari pendekatan agribisnis dan partisipatif yang tadinya hanya terdiri dari subsistem petani, penyuluh dan kelembagaan struktural, menjadi subsistem petani, penyuluh, pelaku agribisnis lainnya, lembaga penelitian dan lembaga pelatihan (Hafsah, 2006).

Kelembagaan penyuluhan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sepanjang hal itu memungkinkan adanya pembagian kerja yang lebih jauh, peningkatan pendapatan, perluasan usaha dan kebebasan untuk memperoleh peluang usaha. Dalam kehidupan nyata, kelembagaan dapat menjadi peubah eksogen dalam proses pembangunan dengan demikian kelembagaan dapat dianggap sebagai penyebab segala perubahan pembangunan. Namun dipihak lain kelembagaan bisa diduga menjadi peubah endogen dimana perubahan kelembagaan diakibatkan karena adanya perubahan-perubahan pada sistem sosial masyarakat yang ada.

Menurut Scott (2008) dalam Nasdian (2008), perubahan kelembagaan secara teoritis tidak hanya disebabkan oleh faktor regulasi, namun juga oleh stuktur sosial masyarakat yang merupakan faktor-faktor yang dapat mempercepat atau memperlambat (atau menjadi *buffer*) evolusi bersama kelembagaan dan organisasi tersebut.

Pada era BIMAS, penyuluhan pertanian dilakukan melalui pendekatan sentralistis dan berkoordinasi yang ketat

antar instansi terkait dari pusat sampai ke daerah. Sedangkan konsep penyuluhan di era otonomi diserahkan sepenuhnya ke kabupaten/kota. Pemerintah pusat sepenuhnya hanya bertugas merumuskan kebijakan, norma, standar, dan model-model penyuluhan partisipatif (RPP IPB, 2005). Namun, munculnya beberapa peraturan pemerintah yang kurang mendukung penyelenggaraan penyuluhan daerah, seperti PP No.25/2000 dan PP No.8/2003 mengakibatkan ruang gerak pemerintah daerah untuk mendirikan kelembagaan penyuluhan pertanian sangat terbatas. Tentunya hal ini menyebabkan kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat provinsi tidak jelas dan kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota beragam.

Undang-undang No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan menyatakan pembagian kelembagaan penyuluhan, yaitu: 1) Kelembagaan di Pusat adalah Badan Penyuluhan yang bertanggung jawab kepada Menteri; 2) Kelembagaan di Provinsi berbentuk Badan Koordinasi Penyuluhan; 3) Kelembagaan di kabupaten/kota berbentuk Badan Pelaksana Penyuluhan; 4) Kelembagaan di Kecamatan adalah Balai Penyuluh Pertanian (BPP); serta 5) Kelembagaan di Desa/Kelurahan berbentuk pos penyuluhan desa/kelurahan yang bersifat non struktural.

Kebijakan pembangunan pertanian pada era desentralisasi adalah mewujudkan pertanian yang tangguh dalam rangka pemantapan ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian serta peningkatan kesejahteraan petani. Kebijakan ini juga mensyaratkan dikembangkannya jaringan kerjasama diantara pelaku agribisnis, penyuluhan pertanian, peneliti, pendidikan dan pelatihan (Hafsah, 2006). Berdasarkan hal-hal tersebut, terdapat dua hal penting yang perlu dipikirkan dan dilaksanakan dengan baik agar penyuluhan dibidang pertanian, perikanan dan kehutanan dimasa depan dapat berjalan dengan efektif secara berkelanjutan, yaitu dibangunnya sistem

penyuluhan yang komprehensif dan diadopsinya pengembangan program-program penyuluhan yang berbasis penelitian dan ilmu pengetahuan (Slamet, 2008).

### Penyuluhan dan Penyuluh Pertanian

Ilmu penyuluhan adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana pola perilaku manusia dibentuk, bagaimana perilaku manusia dapat berubah atau diubah, sehingga membawa pada perubahan kualitas kehidupan orang yang bersangkutan. Sebagai suatu disiplin ilmu, penyuluhan memulai proses perkembangannya dengan meminjam dan merangkum konsep-konsep ilmiah dari berbagai disiplin ilmu lain yang relevan, seperti ilmu pendidikan, psikologi, antropologi, sosiologi, psikologi sosial dan manajemen.

Penyuluhan selalu menitik-beratkan pada perbaikan kualitas kehidupan manusia, lahir dan batin, sehingga kegiatan yang dilakukan akan selalu berkaitan erat dengan ilmu-ilmu lain seperti pertanian, kesehatan dan ilmu-ilmu kesejahteraan sosial lainnya. Jadi sebagai ilmu, penyuluhan bersifat interdisipliner. Hal ini berkaitan erat dengan praktek penyuluhan di lapangan yang menuntut pendekatan interdisipliner. Kenyataan menunjukkan bahwa beberapa keberhasilan pembangunan pertanian di Indonesia terjadi karena ditopang oleh penggunaan pendekatan interdisipliner ilmu-ilmu pertanian, ekonomi, sosiologi dan komunikasi seperti yang terangkum dalam ilmu penyuluhan.

Penyuluhan sebagai proses pendidikan, maka penyuluh harus dapat membawa perubahan manusia dalam hal aspek-aspek perilaku baik pengetahuan maupun ketrampilannya. Penyuluhan sebagai proses demokrasi, maka penyuluhan harus mampu mengembangkan suasana bebas, untuk mengembangkan kemampuan masyarakat.

Penyuluh harus mampu mengajak sasaran penyuluhan berfikir, berdiskusi,

menyelesaikan masalahnya, merencanakan dan bertindak bersama-sama dibawah bimbingan orang-orang di antara mereka. Sebagai proses yang kontiniu, penyuluhan harus dimulai dari keadaan petani pada waktu itu kearah tujuan yang mereka kehendaki berdasarkan kepada kebutuhan dan kepentingan yang senantiasa berkembang yang dirasakan oleh sasaran penyuluhan. Bila penyuluh melihat adanya kebutuhan, tetapi kebutuhan itu belum dirasakan oleh sasaran penyuluhan, padahal kebutuhan tersebut dinilai sangat vital dan mendesak, maka penyuluhan perlu berusaha terlebih dahulu untuk menyadarkan sasaran akan kebutuhan yang tersebut (*unfelt need*) menjadi kebutuhan yang dirasakan oleh sasaran (*felt need*).

Mardikanto (1991) menyatakan bahwa penyuluhan pertanian adalah suatu sistem pendidikan bagi masyarakat (petani) untuk membuat mereka tahu, mau dan mampu berswadaya melaksanakan upaya peningkatan produksi, pendapatan atau keuntungan dan perbaikan kesejahteraan masyarakatnya. Tedjokoesoemo (1996) berpendapat penyelenggaraan penyuluhan pertanian pada dasarnya mempunyai keluaran (*output*) yang tidak sama pada berbagai tingkat, yaitu lapangan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan pusat serta untuk berbagai kategori petani nelayan. Misi pokok penyuluhan pertanian adalah pengembangan sumberdaya manusia dan alih teknologi. Sedangkan keberhasilan suatu kegiatan penyuluhan menurut Mardikanto (1991) dapat diukur dari seberapa jauh telah terjadi perubahan perilaku (petani) sasarannya, baik menyangkut pengetahuan, sikap, dan keterampilan.

Menurut UU No. 16/2006, penyuluh adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan. Lebih lanjut, penyuluh dipilah menjadi tiga kategori, yaitu penyuluh PNS, swasta, dan swadaya. Syamsudin (1977) menyatakan peran penyuluh sebagai pemimpin, pengajar, dan penasehat.

Menurut Hafsah (2006), bahwa efektivitas penyuluhan pertanian akan sangat ditentukan oleh seberapa jauh

lembaga penyuluhan diperhatikan oleh subsistem yang lain, atau mampu mengembangkan dirinya menjadi suatu kegiatan strategis. Dalam banyak hal kasus, terlihat bahwa keberhasilan penyuluhan pertanian sangat ditentukan oleh perhatian pengusaha atau pimpinan wilayah setempat.

Penyuluh adalah seorang pendidik dan pembimbing masyarakat tani. Sebagai seorang mubaligh atau seorang *missionair*, seorang penyuluh pertanian harus mempunyai panggilan terhadap pekerjaannya, harus mempunyai cita-cita atau ideologi (Mardikanto, 1991). Sedangkan menurut UU No. 16/2006, penyuluh adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.

Dalam menyampaikan informasi kepada sasaran, penyuluh hendaknya mampu melaksanakan proses belajar mengajar, selain sebagai seorang guru, hendaknya menempatkan diri sebagai teman sasaran dalam mengambil keputusan. Dalam kaitan ini penyuluh dituntut mampu berperan ganda, antara lain dengan menjalankan fungsi sebagai komunikator, pendidik dan motivator, bagi terjadinya perubahan perilaku sasaran, karena penyuluh mengkomunikasikan pesan-pesan penyuluhan kepada sasaran, dengan metode yang syarat nilai pendidikan, sehingga bertindak sebagai pendidik dengan berperan sebagai motivator bagi peningkatan kesadaran masyarakat kearah pencapaian tujuan yang diinginkan, dengan melaksanakan tugas-tugas tertentu. Selain itu, penyuluh juga harus mampu melakukan pengamatan terhadap keadaan sumberdaya yang terdapat di perdesaan, memberikan contoh pemecahan masalah dari berbagai kebutuhan pokok yang dihadapi masyarakat, serta menganalisa pemecahan masalah tersebut (Departemen Pertanian, 2002).

Kegiatan penyuluhan akan menjadi kegiatan yang mendapat apresiasi petani bila sang penyuluh dapat memberikan informasi-informasi segar dan bermanfaat serta memberikan pencerahan dalam setiap

*problem* usahatani yang dilakukan oleh para petani sebagai sasaran dari penyuluhannya. Standarisasi kualitas sumberdaya manusia seorang penyuluh pertanian mutlak menjadi *main point* dalam perekrutan dan penempatan PPL di lapangan. Trampil memahami masalah, mengetahui kebutuhan, dan dapat memberikan solusi pada setiap permasalahan yang dialami dan ditemui oleh petani merupakan kebutuhan ideal yang harus dapat distandarkan bagi setiap PPL di lapangan.

Menurut Hafsa (2006), perubahan yang paling mendasar pada penyuluhan paradigma baru adalah perubahan pengambilan keputusan sentralisasi menjadi desentralisasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program penyuluhan sebagai konsekuensi dari konsep penyuluhan desentralisasi.

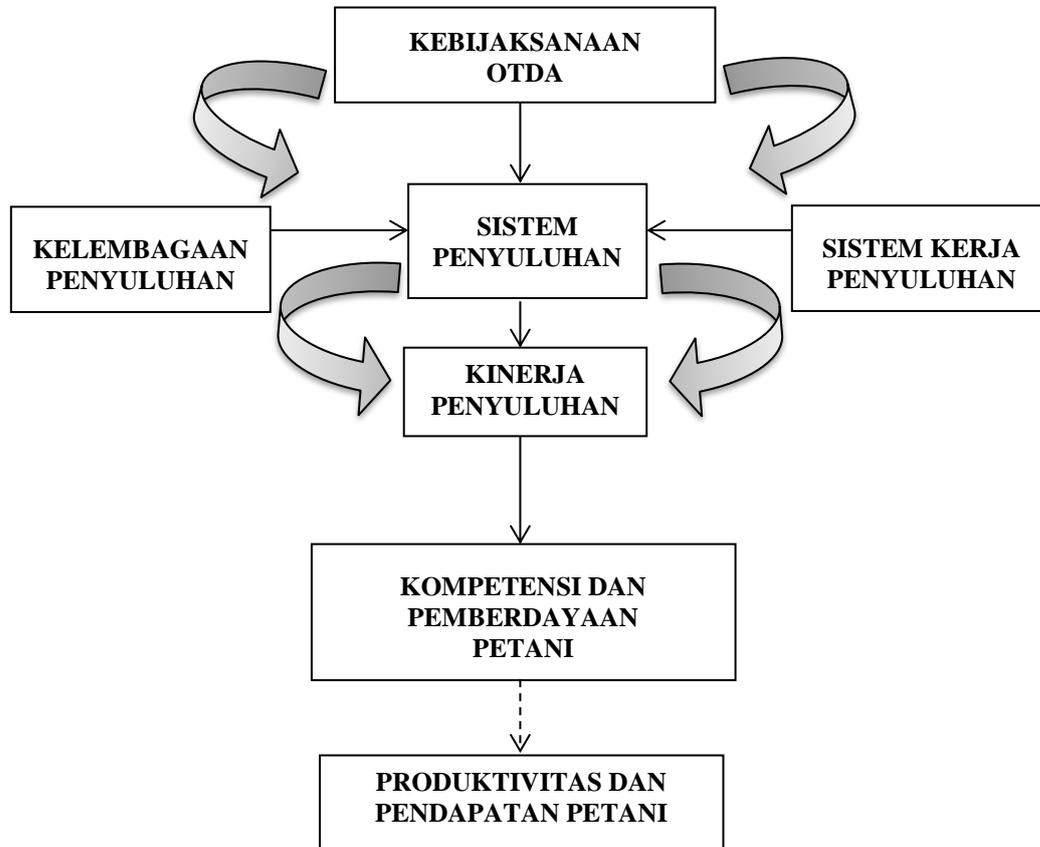
### **Kerangka Pemikiran**

Gagasan paradigma pembangunan pertanian ternyata telah menimbulkan pergeseran dalam struktur kelembagaan penyuluhan pertanian. Implementasi reorientasi dan restrukturisasi kelembagaan penyuluhan pertanian direspon daerah sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan daerah. Apapun model kelembagaan penyuluhan pertanian yang dikembangkan, tujuan akhirnya adalah percepatan proses alih teknologi inovasi dari penyuluh sebagai agen pembaharu (*change agent*) kepada petani sebagai pelaku utama usahatani.

Sejalan dengan keragaman bentuk kelembagaan penyuluhan pertanian, ternyata telah ikut merubah sistem kerja penyuluhan pertanian dan kinerja petugas penyuluh pertanian di daerah. Kinerja penyuluh merupakan kemampuan penyuluh mematuhi jam kerja dan ketepatan dalam menyelesaikan pekerjaan. Sehingga kondisi ini mempengaruhi kompetensi dan pemberdayaan petani yang dapat dilihat dari tingkat adopsi teknologi dan inovasi, yang akhirnya akan mempengaruhi produktivitas dan pendapatan yang diterima oleh petani.

Penelitian ini menelaah deskripsi kebijaksanaan otonomi daerah dan pengaruhnya terhadap sistem penyuluhan pertanian seperti kelembagaan penyuluhan, sistem kerja penyuluhan pertanian, kinerja pelaku penyuluhan pertanian, tingkat

penerapan teknologi petani dan produktivitas usahatani serta faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja penyuluh akibat restrukturisasi sistem penyuluhan pertanian dan pemecahan masalahnya secara partisipatif (Gambar 1).



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Analisis Kelembagaan Penyuluhan di Provinsi Riau

## METODE PENELITIAN

### Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian mengambil lokasi di tiga kabupaten/kota, yaitu Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan. Penetapan lokasi dilakukan secara ‘purposive’ dengan pertimbangan lokasi penelitian mempunyai sistem kelembagaan penyuluhan, dimana penyuluh pertanian ber-satminkal (Satuan Administrasi Pangkal) di lembaga penyuluhan tersebut (Kabupaten Kampar), bersatminkal dibawah Dinas Pertanian (Kabupaten Pelalawan) dan bersatminkal di lembaga penyuluhan terpadu (Kota Pekanbaru). Pengkajian dilakukan selama dua bulan mulai Maret sampai April 2008.

### Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan pada kajian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer meliputi sistem kerja penyuluhan, karakteristik penyuluh (umur, masa kerja, tingkat pendidikan formal, bidang keahlian, jumlah keluarga, kerja sampingan), kinerja penyuluh, karakteristik petani (meliputi umur, tingkat pendidikan, pengalaman berusahatani, jumlah anggota keluarga, dll), tingkat penerapan teknologi. Sedangkan data sekunder yang diperoleh dengan telahan dokumen dari laporan-laporan dari instansi terkait, meliputi: 1) aspek kelembagaan (visi, misi, tugas pokok); 2) aspek ketenagaan (data jumlah tenaga penyuluh, status penyuluh, penyebaran), 3) aspek

penyelenggaraan (program/kegiatan/materi penyuluhan, dan empat aspek pendanaan (alokasi anggaran, dana operasional penyuluh, tunjangan operasional serta data-data terkait dengan potensi daerah)).

**Metode Analisis**

Data yang diperoleh selanjutnya diolah dan dianalisis. Rincian analisis data yang digunakan untuk menjawab setiap tujuan kajian dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Rincian Metode Pengumpulan dan Analisa Data

Tujuan	Data yang Diperlukan	Sumber Data	Metode Pengumpulan Data	Metode Analisis dan Penyajian Data
1. Mengidentifikasi dan menganalisis keragaan atau profil kelembagaan penyuluhan pertanian era otonomi daerah	Visi dan Misi, Kebijakan, Tupoksi, Program, Satminkal Penyuluh, Jumlah BIP/BPP, Jumlah RT Petani, Jumlah / Kelas Kelompok Tani, Jumlah Kontak Tani	- Kasatker - Kasubdin - Ka BPP	- Telahan Dokumen - Wawancara	Deskriptif dan Tabulasi
2. Menganalisis pelaksanaan sistem kerja penyuluhan pertanian pada kelembagaan yang berbeda	Sistem Penyuluhan, Persepsi Penyuluh, Sistem Kerja Penyuluhan	- Ka Satker - Ka BPP - Penyuluh - Kelompok Tani	- Wawancara - FGD	Analisis Deskriptif, Komparatif, Tabulasi
3. Menganalisis dampak penyelenggaraan penyuluhan yang berbeda terhadap kinerja penyuluh dan tingkat penerapan teknologi petani	Karakteristik Penyuluh, Kinerja Penyuluh, Karakteristik Petani, Tingkat Adopsi Teknologi	- Penyuluh - Petani	- Wawancara - Pengamatan	Deskriptif, Komparatif, Tabulasi
4. Merumuskan strategi pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian berdasarkan tipe kelembagaan penyuluhan	Potensi Masalah dan kebutuhan, Strategi Pengembangan kelembagaan	- Ka Satker - Ka BPP - Penyuluh - Petani	- Wawancara - FGD	Deskriptif, SWOT

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Keragaan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian**

Secara umum, keragaman bentuk kelembagaan penyuluhan pertanian di kabupaten/kota Provinsi Riau dapat diklarifikasi ke dalam tiga bentuk: 1) Memiliki institusi khusus yang menangani kepenyuluhan sendiri; 2) Berada dibawah institusi yang khusus menangani

penyuluhan secara terpadu (tidak khusus menangani pertanian saja namun juga bidang lain seperti keagamaan, Keluarga Berencana, kenakalan remaja, Narkoba, AIDS, dan lain-lain; serta 3) Terpusat pada salah satu Dinas subsektor yaitu Dinas Pertanian dan berada di bawah sub Dinas Penyuluhan.

Berdasarkan hasil observasi, kelembagaan penyuluhan pertanian di Kabupaten Kampar berada pada Kantor Informasi dan Penyuluhan Pertanian serta kedudukannya setingkat eselon III dan

langsung dibawah SEKDA. Selain itu juga terdapat satu wadah koordinasi lingkup pertanian yang dibentuk Pemda Kampar yaitu Forum Koordinasi Penyuluh Pertanian (FKPP) yang diketuai oleh Sekretaris Daerah dan beranggotakan instansi lingkup pertanian dan instansi terkait lainnya. Jumlah penyuluh di Kabupaten Kampar sebanyak 208 orang dan sebanyak 52 persen adalah sarjana. Hal ini antara lain disebabkan karena adanya kualifikasi penyuluh yang menghendaki pendidikan dasar sarjana. Sistem dan metode penyuluhan di Kabupaten Kampar masih memakai sistem LAKU dimana pertemuan di Kelompok Tani dihadiri oleh penyuluh. Materi penyuluhan telah disusun berdasarkan kebutuhan petani, dan penyampaian oleh PPL (Penyuluh Pertanian Lapang) sudah komprehensif, namun materi-materi tersebut belum merupakan materi yang terkini terhadap teknologi yang berkembang.

Penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Kota Pekanbaru berada di bawah institusi yang khusus menangani penyuluh, yaitu Kantor Penyuluhan Informasi Pertanian Terpadu (KIPTK). Namun demikian, visi dan misi KPIPT Kota Pekanbaru bersifat umum atau tidak spesifik dibidang penyuluhan pertanian, begitu juga dengan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI). Pejabat struktural yang seharusnya melayani kepentingan penyuluh tidak memahami secara penuh tugas-tugas penyuluhan, karena mereka tidak mempunyai latar belakang ilmu dibidang penyuluhan, sehingga gerakan penyelenggaraan penyuluhan tidak terlihat secara nyata. Selain itu, meskipun materi penyuluhan telah disusun berdasarkan kebutuhan petani, dan penyampaiannya oleh PPL sudah komprehensif, namun belum merupakan materi yang terkini terhadap teknologi yang berkembang.

Keragaan sistem penyelenggaraan penyuluhan di Kabupaten Pelalawan terpusat di Dinas Pertanian sub Dinas Penyuluhan yang juga membawahi segala urusan administrasi penyuluh baik yang berlatar belakang keterampilan tanaman

pangan, perkebunan, peternakan, maupun perikanan sehingga koordinasi dan kerjasama kegiatan penyuluhan antar dinas subsektor hanya dilakukan melalui rapat-rapat tertentu yang diundang oleh salah satu dinas yang merasa ada keterkaitan dan kepentingan dengan penyuluh. Rasio penyuluh dengan kelompok Tani yang dibina di Kabupaten Pelalawan hanya 0,19 sehingga menyebabkan pelaksanaan kegiatan penyuluhan agak terhambat, yang pada akhirnya berpengaruh pada tujuan penyuluhan. Keragaan kelembagaan penyuluhan di lokasi penelitian dapat dilihat pada Tabel 2.

Perubahan pada kelembagaan penyuluhan pertanian yang merujuk kepada paradigma desentralisasi menyebabkan adaptasi dan *respons* setiap daerah berbeda dan menjadi beragam dimana perbedaan tersebut terakomodasi pada tiga pilar, yaitu *regulative*, *normative*, dan *cultural cognitive*. Pada pilar *regulative*, keragaman muncul karena perbedaan interpretasi dalam memberikan kewenangan kegiatan penyuluhan pada tingkat kabupaten dan kecamatan yang dimanifestasikan kedalam masing-masing surat keputusan kepala daerah. Pada pilar *normative*, keragaman *respons* disebabkan semakin kuatnya otonomi dan persoalan yang dihadapi kelembagaan penyuluhan pertanian. Sedangkan pada pilar *cultural cognitive*, keragaman *respons* muncul akibat semakin kuatnya tuntutan masyarakat untuk mengedepankan kelembagaan lokal yang berbasis kultur setempat.

Hal ini dapat dilihat pada keragaan kelembagaan penyuluhan pertanian. Pada kabupaten yang penyuluhnya bersatminkal di beberapa dinas subsektor telah membagi habis BPP di kabupaten sesuai dengan komoditas daerah, yaitu BPP pertanian, peternakan dan perikanan. Dengan keberadaan BPP saat ini menyebabkan terhambatnya arus informasi dan pertukaran informasi baik antar petani maupun petani dengan penyuluh dan berkurangnya keakraban serta kerjasama antar mereka. BPP di Kecamatan saat ini sudah tidak terlihat lagi gerakannya,

bahkan beberapa BPP beralih fungsi menjadi Kantor Cabang Dinas.

Tabel 2. Keragaan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Tiga Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2007

No	Aspek/Uraian	Kampar	Pekanbaru	Pelalawan
A.	Kelembagaan Satminkal Penyuluh			
	Kelembagaan Penyuluh BIP/BPP	KIPP 20	KPIPT 6	Sub din Luh 11
	Visi, Misi, Tupoksi	Spesifik	Umum	Umum
B.	Ketenagaan			
	Penyuluh (org)	210	43	83
	- Sarjana	111	10	26
	- Non sarjana	99	33	48
	- Rasio penyuluh/kel tani	0,21	0,2	0,18
	Status Penyuluh			
	- PNS	176	30	36
	- Honorer	34	13	47
	Jumlah rumah tangga tani	80.433	25.121	60.471
	Jumlah Kelompok Tani	1014	135	448
	- Pemula	657	125	444
	- Lanjut	299	7	218
	- Madya	64	2	292
	- Utama	8	1	13
	- Belum dikukuhkan	117	0	288
	Jumlah kontak tani (org)	19	7	18
C.	Penyelenggaraan			
	Penyusunan Program	Per-tahun	Per-tahun	-
	Materi dan Meyode Peny.	Laku	Laku	Laku
	Koordinasi	Intens	Kurang intens	Kurang intens
D.	Pendanaan			
	Alokasi Anggaran APBD	14-17 Milyar/thn	1,2-1,8 Milyar/thn	Kecil
	Dana Operasional	Ada/APBN	-	Ada/APBN
	Sarana dan Prasarana			
	- Roda 2	120 unit	-	34 unit
	- Gedung BPP	80%	16,7%	100%

Sumber: Program Kabupaten/Kota (2007)

### Pelaksanaan Sistem Kerja Penyuluh Pertanian

Berdasarkan kajian secara komprehensif tentang potensi-potensi yang ada di masyarakat dan hasil evaluasi terhadap program penyuluhan pertanian yang telah dilaksanakan oleh kelembagaan penyuluhan di Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru, dan Kabupaten Pelalawan, fungsi pelayanan (42%, 50%, 41%) dan fungsi pengaturan (45%), 51%, 41%)

masih mendominasi sistem kerja penyuluhan sedangkan fungsi lain, yaitu fungsi informasi (34%, 21%, 22%), fungsi penelitian (36%, 11%, 29%), dan fungsi pasar (25%, 19%, 25%) masih bersifat pelengkap. Hal ini mengindikasikan petani sedang berubah dari petani subsistem menjadi petani komersil dengan fungsi penyuluhan yang lebih menekankan pada prinsip pengembangan pengetahuan dan keterampilan serta pendapatan usahatani.

Persepsi penyuluh tentang keberadaan kelembagaan penyuluh di tiga

kabupaten (Pelalawan, Kampar, dan Pekanbaru) masing-masing menunjukkan bahwa manajemen telah sesuai dengan fungsi penyuluhan (70%, 91%, 77%), tugas pokok telah sesuai dengan sistem penyelenggaraan penyuluhan (74%, 93%, 75%), ketersediaan sarana penunjang telah sesuai (61%, 81%, 65%), serta eksistensi kelembagaan penyuluhan telah sesuai dalam meningkatkan etos kerja penyuluh (63%, 91%, 75%). Namun demikian penyuluh berharap ada lembaga khusus yang dapat menangani kepentingan penyuluh dan petani secara langsung, dimana lembaga penyuluhan dapat menjadi wadah komunikasi, informasi dan pertemuan antar penyuluh, petani dan pembuat kebijakan.

Hasil pengamatan terhadap sistem kerja penyuluhan pertanian menunjukkan bahwa frekuensi LAKU (Latihan dan Kunjungan) belum sepenuhnya terlaksana, hal ini dapat terlihat dari intensitas LAKU ke kelompok tani yang pada umumnya dilakukan seminggu (49% di Pelalawan dan 53% di Kampar) serta lebih dari satu minggu (50% di Pekanbaru) untuk satu kelompok tani. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan tenaga penyuluh, cukup luasnya wilayah binaan, serta tidak bermukimnya penyuluh di wilayah kerjanya. Sedangkan aspek lain seperti materi pertemuan penyuluhan, ketepatan metode penyuluhan, pembuatan perencanaan kelompok tani, frekuensi pertemuan yang diikuti di BPP, yaitu dua minggu sekali, kemampuan BPP menyelesaikan masalah penyuluh dan petani, kesesuaian materi pertemuan BPP dengan urgensi masalah yang dihadapi PPL, serta ketersediaan sumber informasi teknologi di BPP sudah dianggap sesuai dengan persentase lebih dari antara 47-96 persen, kecuali untuk aspek frekuensi pertemuan di BPP di Pelalawan yang umumnya dilakukan sebulan sekali (91%).

Namun demikian, sering kali bahan hasil-hasil penelitian yang dikirimkan ke Dinas subsektor pertanian tidak sampai lagi kepada penyuluh di lapangan dan tertumpuk di kantor unit kerja Kabupaten. Tidak terdistribusinya bahan-bahan

informasi pertanian ini antara lain karena tidak berfungsinya BPP yang biasa dimanfaatkan untuk pertemuan setiap dua minggu sekali. Selain itu, kemampuan petani dalam menyusun perencanaan usahatani ditingkat petani dinilai masih rendah. Hal ini disebabkan karena pembinaan yang dilakukan selama ini mengacu kepada kepentingan sepihak (*top down*), sehingga petani kurang terdidik untuk lebih aspiratif.

### **Dampak Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian**

Penyuluh di lokasi penelitian memiliki rata-rata usia antara 30-40 tahun, pendidikan akhir SLA, keahlian dibidang pangan (44-70%), dan lebih dari 50 persen penyuluh memiliki pekerjaan sampingan dalam menunjang kelancaran usahatani. Tingkat motivasi penyuluh dapat dilihat dari kinerja penyuluh terhadap pekerjaan yang dilakukannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluh di tiga lokasi penelitian memiliki waktu kerja rata-rata 33 jam/minggu, frekuensi kunjungan ke kelompok tani seminggu sekali (44-53%) dengan persentase ketepatan penyelesaian administrasi dan pelaporan sebesar 65-87 persen. Frekuensi kunjungan ke kelompok tani untuk Kabupaten Kampar cukup tinggi karena adanya pengawasan yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten sampai ke kecamatan dan WKPP (Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian).

Karakteristik petani di wilayah penelitian memperlihatkan bahwa lebih dari 50 persen petani berusia produktif (25-55 tahun) dengan pengalaman kerja 10-20 tahun. Namun tingkat pendidikan petani pada umumnya masih setingkat SD (Sekolah Dasar). Dari hasil wawancara, diketahui bahwa tidak semua petani memperoleh kesempatan dalam mengikuti diklat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan baik yang diadakan oleh pemerintah maupun pihak lain. Selain itu, informasi teknologi dari berbagai sumber teknologi tidak dapat diterima oleh semua petani karena selain teknologi tersebut

relatif sulit diterapkan, keberhasilannya juga sulit diraih disebabkan banyaknya faktor-faktor pembatas seperti kondisi alam, keterampilan petani, ketersediaan modal, dan lain-lain.

Persepsi petani tentang sistem LAKU menjelaskan bahwa lebih dari 50 persen petani menyatakan bahwa sistem LAKU mempercepat proses adopsi teknologi dan transfer teknologi baru, memperbaiki manajemen usahatani dan meningkatkan pendapatan usahatani. Kemudian lebih dari 70 persen petani menyatakan bahwa sistem LAKU menjadi fasilitator antara petani dan pemerintah. Pemberdayaan atau kompetensi penyuluh dan petani dapat diwujudkan pada tingkat penerapan teknologi usahatani. Namun dilihat dari tingkat penerapan teknologi usahatani, pada umumnya petani belum menerapkan teknologi sesuai introduksi, artinya hanya sebagian komponen teknologi usahatani yang diadopsi oleh petani. Untuk itu harus dilakukan peningkatan efektivitas pembinaan kepada kelompok tani sasaran, salah satunya dengan mengurangi jumlah kelompok binaan untuk tiap penyuluh, idealnya satu orang penyuluh membina 7-10 kelompok.

### Strategi dan Program Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian

Pada strategi pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian ditemukan berbagai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang berpengaruh terhadap peran dan perkembangan pelaksanaan kegiatan (Lampiran 1).

Hasil analisis terkait perancangan alternatif strategi yang berguna dalam pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian di Provinsi Riau merumuskan delapan prioritas strategi dengan tiga strategi utama, yaitu: 1) Pembentukan badan sendiri yang spesifik menaungi penyuluhan pertanian (skor 6.347); 2) Memaksimalkan keberadaan PERDA dengan dukungan UU No.16/2006 serta PP 41/2007 (skor 5.855); dan 3) Penghargaan yang diberikan pemerintah pusat terhadap aparaturnya akan mampu mendorong aparaturnya

di daerah untuk lebih peduli terhadap penyuluhan (skor 5.424).

Dengan kelemahan, kekuatan, peluang dan tantangan yang ada, maka program yang dapat mewujudkan strategi pembentukan lembaga penyuluhan pertanian tersendiri di Provinsi Riau adalah: 1) Program Penataan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian; 2) Program Peningkatan Ketenagaan Penyuluh Pertanian; dan 3) Program Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Dari hasil kajian diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kelembagaan penyuluhan pertanian di Provinsi Riau pada era otonomi mengalami perubahan bersama (*co-evolution*) pranata sosial kelembagaan penyuluhan yang terakomodasi pada ketiga pilar penopang kelembagaan penyuluhan pertanian, yaitu pilar *regulative*, *normative* dan *cultural cognitive*. Kelembagaan di Kabupaten Kampar dinilai cukup baik dibandingkan kelembagaan di Kabupaten Pelalawan dan Kota Pekanbaru.
2. Pelaksanaan fungsi pelayanan dan fungsi pengaturan masih mendominasi sistem kerja penyuluhan. Keberadaan kelembagaan penyuluhan belum dapat mengakomodir kepentingan penyuluh dan petani dan frekuensi LAKU belum sepenuhnya terlaksana. Pelaksanaan sistem kerja.
3. Kondisi kelembagaan penyuluhan dapat mempengaruhi kinerja penyuluh pertanian, seperti disiplin mematuhi jam kerja, frekuensi kunjungan ke kelompok tani, serta ketepatan dalam menyelesaikan administrasi dan pelaporan. Penyuluh pada lembaga penyuluhan di Kabupaten Kampar menyelenggarakan penyuluhan yang baik dibanding penyuluh yang berada

di Kabupaten Pelalawan dan Kota Pekanbaru.

4. Rumusan strategi pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian di Provinsi Riau adalah membentuk badan sendiri yang spesifik, yang menaungi penyuluhan pertanian. Program yang dapat mewujudkan pembentukan lembaga penyuluhan pertanian tersendiri di Provinsi Riau adalah Program Penataan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Program Peningkatan Ketenagaan Penyuluh Pertanian, dan Program Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian.

### Saran

Saran atau rekomendasi kebijakan yang dapat diusulkan adalah:

1. Penyatuan penyuluh pada satu lembaga yang dapat mengakomodasi kepentingan penyuluh pertanian dan petani.
2. Pembuatan program unggulan yang disertai target-target tertentu sesuai kondisi wilayah.
3. Terus melakukan Sistem Latihan dan Kunjungan (LAKU) yang merupakan sistem kerja penyuluhan pertanian.
4. Penyusunan dan pembuatan program penyuluhan sebagai acuan dan tolak ukur terhadap pekerjaan penyuluh.
5. Penetapan kebijakan otonomi daerah dalam menetapkan struktur kelembagaan penyuluhan pertanian yang bisa: 1) Mencerminkan adanya kerjasama petani-penyuluh dan peneliti; 2) Mengefektifkan kembali fungsi dan peranan BPP; 3) Membangun dan mengoperasionalkan jaringan kelembagaan komunikasi, informasi dan penyuluhan; 4) Mengorientasikan para petugas terutama para administrator terdepan dan penyuluh pertanian; serta 5) Mengatur pendanaan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Amanah, S. 2006. Peran Strategis Penyuluhan Pembangunan: Tinjauan dari Sisi Akademis. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Departemen Pertanian. 2002. Kebijakan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian. Badan Pengembangan SDM Departemen Pertanian. Jakarta.
- Departemen Pertanian. 2006. Rencana Strategis Departemen Pertanian 2005-2009. Jakarta.
- Hafsah, J. 2006. Kedaulatan Pangan. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Mardikanto, T. 1991. Penyuluhan Pembangunan Pertanian. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Mardikanto, T. 2008. Refleksi dan Rekomendasi Implementasi Penyuluhan Pembangunan Pertanian dalam Pemberdayaan Manusia Pembangunan yang Bermartabat. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Nasdian, Fredian Tonny. 2008. Kelembagaan dan Tata-Pemerintahan Kecamatan: Review Implementasi dan Rekomendasi. Project Working Paper Series No.02. Kerjasama Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan, Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat, Institut Pertanian Bogor dengan Democratic Reform Support Program, United States Agency for International Development.
- Pemerintah Provinsi Riau. 2008. Merekat Kebersamaan Membangun Negeri. Pekanbaru
- [RPP] IPB. 2005. Strategi dan Kebijakan Revitalisasi Penyuluhan Pertanian. Badan Ketahanan Pangan. Departemen Pertanian. Jakarta.
- Syamsudin S, U. 1977. Dasar-dasar Penyuluhan dan Modernisasi Pertanian. Bandung: Binacipta.
- Slamet, M, 2008. Menuju Pembangunan Berkelanjutan Melalui Implementasi UU No. 16/2006

- tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan, dalam Pemberdayaan Manusia Pembangunan yang Bermartabat. Medan: Pustaka Bangsa Press. Medan.
- Suhardiyono, L. 1990. Penyuluhan: Petunjuk bagi Penyuluhan Pertanian. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Suryana, A. 2003. Kapita Selekta: Evolusi Pemikiran Kebijakan Ketahanan Pangan. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta.
- Tedjokoesoemo, H. 1996. Upaya Pemahaman Tugas dan Fungsi Penyuluhan Pertanian (makalah disampaikan pada kegiatan Apresiasi Manajemen dan Metodologi Penyuluhan bagi Peneliti. Bogor, 15-19 Januari 1996). Pusat Penyuluhan Pertanian Departemen Pertanian. Jakarta.
- Tony, NF dan Utomo, BS. 2004. Pengembangan Kelembagaan dan Modal Sosial. Modul Kuliah Magister Profesional Pengembangan Masyarakat Departemen Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian. Bogor: Institut Pertanian Bogor.



Lampiran 1. Matriks SWOT (*Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats*)

<p style="text-align: center;"><b>IFE (Internal Factor Evaluation)</b></p> <p style="text-align: center;"><b>EFE (External Factor Evaluation)</b></p>	<p><b>Kekuatan (Strengths)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PERDA kelembagaan Penyuluhan</li> <li>2. Lembaga Peneliti dan Pelatihan Pertanian</li> <li>3. Penghargaan terhadap penyuluh berprestasi</li> <li>4. Insentif yang memadai bagi pegawai/penyuluh</li> <li>5. Tersedianya sarana komunikasi bagi penyuluh dan stakeholder</li> </ol>	<p><b>Kelemahan (Weaknesses)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi antar subsektor lemah</li> <li>2. Kuantitas dan kualitas PPL terbatas</li> <li>3. Sarana dan prasarana PPL terbatas</li> <li>4. Anggaran APBD terbatas</li> <li>5. Perbedaan persepsi keberadaan kelembagaan penyuluhan</li> </ol>
<p><b>Peluang (Opportunities)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No.16/2006 Ttg Sistem Penyuluhan</li> <li>2. PP 41/2007 Ttg SOTK daerah</li> <li>3. Permenpan No. PER/02/MENPAN/2/2008 ttg jabatan fungsional PPI dan Kompetensi serta Profesionalisme</li> <li>4. Penghargaan terhadap penyuluh berprestasi di tk. Nasional</li> <li>5. Tersedianya sarana komunikasi bagi penyuluh dan stakeholder tingkat Nasional (PENAS)</li> </ol>	<p style="text-align: center;">(S – O)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memaksimalkan keberadaan PERDA dengan dukungkan UU No.16/2006 serta PP 42/2007 (S1, O1, O2, O3)</li> <li>2. Peningkatan kinerja kepala daerah untuk memaksimalkan PERDA kelembagaan di daerahnya (S1, S2, O4)</li> </ol>	<p style="text-align: center;">(W – O)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan koordinasi antar subsektor (W1, O1, O2, O5)</li> <li>2. Penghargaan yang diberikan pemerintah pusat terhadap aparatur akan mampu mendorong aparatur di daerah untuk lebih peduli terhadap penyuluhan (W1, W2, W5, O4, O5)</li> </ol>
<p><b>Ancaman (Threats)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alih fungsi profesi penyuluh</li> <li>2. Inkonsistensi peraturan/perundangan</li> <li>3. Tumpang tindih program intansi terkait</li> <li>4. Rendahnya minat masyarakat terhadap sektor pertanian</li> </ol>	<p style="text-align: center;">(S – T)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perkuat PERDA untuk mengatasi terjadinya alih fungsi profesi penyuluh (S1, T2, T3)</li> <li>2. Mensosialisasikan PERDA kepada masyarakat luas (S5, T4, T1)</li> </ol>	<p style="text-align: center;">(W – T)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan badan sendiri yang spesifik menaungi penyuluhan pertanian (W1, W2, W3, W5, T1, T2, T3)</li> <li>2. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait (W1, W5, T2, T3)</li> </ol>